

## BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

### 2.1 EKONOMI MAKRO

Secara umum selama kondisi makro ekonomi Jawa Tengah per triwulan III tahun 2016 relatif melambat apabila dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah hanya sebesar 5,06%, atau lebih rendah 0,68% dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan III 2015 yang mencapai 5,75%. Perlambatan terutama disumbang oleh komponen konsumsi, investasi dan ekspor luar negeri. Sedangkan untuk angka inflasi Jawa Tengah pada 2016 sebesar 2,72%, lebih rendah dari kondisi 2015 sebesar 2,96%. Komoditas yang memberikan sumbangan atas rendahnya tingkat inflasi di Jawa Tengah selama tahun 2016 antara lain terjaganya komoditas bahan pangan strategis, terjaganya harga minyak dunia, sembako serta semen. Rendahnya angka inflasi ini tentunya meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mendorong peningkatan omzet Koperasi dan UMKM, dimana hingga posisi Desember 2016 omzet Koperasi sebesar Rp. 54,112 trilyun (tumbuh 13,45%, yoy) dan omzet UMKM binaan sebesar Rp 43,570 trilyun (tumbuh 49,66%, yoy). Berdasar Hasil Proyeksi Sensus Penduduk Tahun 2010 jumlah penduduk Jawa Tengah pada 2016 diperkirakan mencapai 34.019.095 jiwa, dimana per Desember 2016 8.058.547 jiwa diantaranya merupakan anggota koperasi atau 23,69%. Dengan jumlah koperasi sebanyak 28.460 unit yang tersebar di 35 Kabupaten/Kota, 23.276 unit (81,78%) merupakan koperasi aktif dan hanya 5.184 unit (18,22%) merupakan koperasi tidak aktif. Sektor Koperasi dan UMKM juga berkontribusi positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah, dimana per Desember 2016 tenaga kerja yang bergerak pada sektor Koperasi sebanyak 153.495 orang, sedangkan dari sisi UMKM Binaan, tenaga kerja yang terserap mencapai 791.767 orang.

Perkembangan koperasi pada Tahun 2016 mencapai 28.460 unit naik 233 unit atau 0,83%, dengan jumlah koperasi aktif mencapai 23.276 unit naik 217 unit atau 0,94%, dan koperasi tidak aktif 5.184 unit naik 16 unit atau 0,31%. Sedangkan jumlah anggota koperasi sebanyak 8.058.547 orang naik 249.569 orang atau 10,87% dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 153.495 orang naik 15.051 orang atau 10,96%.

Upaya pemberdayaan UMKM juga terus dilakukan dimana pada 2016 telah dibina 6.814 UMKM.

Upaya peningkatan akses permodalan bagi UMKM melalui Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga saat ini realisasi KUR di Jawa Tengah melalui 10 (sepuluh) Bank Pelaksana (Bank Mandiri, BRI, BNI, BUKOPIN, Bank Syariah Mandiri, BTN, Bank Jateng, Bank DIY, BCA dan Artha Graha Internasional) per Desember 2016 mencapai Rp. 19.236.000.000,-. Sedangkan jumlah debitur KUR per Desember Tahun 2016.

## 2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditujukan dan diarahkan untuk meningkatkan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat dalam tiga bidang utama yaitu bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan pemerintahan dan bidang fisik infrastruktur.

Bidang ekonomi ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

Bidang sosial budaya dan pemerintahan ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumber daya manusia dengan mempertimbangan karakteristik wilayah dan dinamika perkembangan masyarakat berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Untuk memperoleh pembangunan yang optimal di bidang perkoperasian maka strategi pengembangan yang ditempuh adalah :

### 1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

Upaya Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM dilaksanakan antara lain melalui kegiatan : Perencanaan Koordinasi dan sinergitas, model sistem penguatan Koperasi dan UMKM; Penilaian Kesehatan KSP/USP; Pengawasan, Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi Primer dan Sekunder; Pengembangan dan perkuatan kelembagaan kelompok masyarakat, pra koperasi dan koperasi; serta Peningkatan Kualitas Organisasi, Badan Hukum Koperasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pemeringkatan Koperasi.

### 2. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Melalui Penguatan dan Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Sistem Distribusi/Jaringan Usaha Serta Peningkatan Daya Saing

Upaya Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Melalui Penguatan dan Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Sistem Distribusi/Jaringan Usaha Serta Peningkatan Daya Saing dilaksanakan antara lain melalui kegiatan : pengembangan kualitas usaha, sarana prasarana dan permodalan Koperasi di Wilayah Perdesaan; fasilitasi Bintek Pengembangan Usaha Koperasi Non Pertanian, Pengembangan usaha Koperasi Bidang Agribisnis; fasilitasi Pengurusan Merk Bagi UMKM; fasilitasi Perlindungan Produk (Ijin Depkes) bagi UMKM, dan Pengembangan Produk Unggulan Lokal/Daerah OVOP berbasis KUMKM.

### 3. Penguatan dan Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha KSP/ USP-Koperasi

Upaya Penguatan dan Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha KSP/ USP-Koperasi dilaksanakan melalui kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan Permodalan, Linkage Program Jaringan Usaha, Kemitraan, Asosiasi KSP/USP/KJKS/UJKS Pengembangan STI; Fasilitasi Akses Permodalan bagi UMKM; Fasilitasi Perkuatan Permodalan dan Diversifikasi Usaha Masyarakat/Anggota/Calon Anggota KSP/USP Koperasi di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau; serta Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau.

4. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Melalui Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha

Upaya Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Melalui Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha dilaksanakan melalui kegiatan : Penilaian Keberpihakan Kab/Kota terhadap Pemberdayaan UMKM; Peningkatan kualitas usaha, sarana prasarana dan permodalan koperasi Non Pertanian; Pengembangan dan pemberdayaan sentra, kualitas produk batik UMKM; Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana akses Pemasaran bagi UMKM; Fasilitasi Penumbuhan Wirausaha baru dan Peningkatan Kualitas Produk Sentra; Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk UMKM diwilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau.

5. Perluasan dan Peningkatan Akses Jangkauan Pelayanan Pendidikan

Upaya Perluasan dan Peningkatan Akses Jangkauan Pelayanan Pendidikan dilaksanakan melalui kegiatan: Peningkatan dan Penguatan Kualitas SDM KUMKM serta Peningkatan dan Penguatan Kualitas SDM KUMKM di Kawasan Penghasil dan Industri Hasil Tembakau.

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum**

Sumber Pendapatan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2016 total target sebesar Rp. 615.000.000,- terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 618.690.000,- atau sebesar 100,6% dari target yang ditetapkan sehingga total pendapatan daerah pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 618.690.000,-

Anggaran Pos Belanja tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp.62.556.749.000,-, terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.20.507.124.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.931.167.740,- atau 97,19% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 42.049.625.000,- dengan realisasi belanja Rp.40.963.209.153,- atau 97,42%. Secara keseluruhan realisasi belanja daerah untuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah mencapai 97.34% atau sebesar Rp. 60.894.376.893,- Proporsi terbesar realisasi belanja daerah untuk tahun anggaran 2016 adalah untuk belanja barang jasa sebesar 56.55% atau Rp. 35.373.511.893,- dari anggaran sebesar Rp.36.304.590.000,-

. Secara rinci proporsi realisasi belanja pegawai untuk tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 4.481.290.500,- atau 5,25% dari total realisasi belanja langsung. Belanja barang jasa sebesar Rp. 35.373.511.893,- atau 90,08% dari total realisasi belanja langsung. Untuk belanja barang jasa barang yang dihibahkan kepada masyarakat tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.458.287.190,- sedangkan untuk realisasi untuk belanja modal tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp.1.108.406.760,- atau 4,67% dari total realisasi belanja langsung. Belanja modal yaitu berupa: Pengadaan alat-alat bantu, Pengadaan alat kantor, Pengadaan alat rumah tangga, Pengadaan Komputer, Perlengkapan Kantor, Pengadaan Meubelair, Konstruksi Bangunan, Penghias Ruangan Rumah Tangga, Alat-alat Studio, Buku Perpustakaan.

### **3.1.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Meskipun secara keseluruhan realisasi pendapatan dan pengelolaan belanja daerah telah memenuhi target namun masih terdapat potensi yang masih bisa dioptimalkan pencapaian kinerja.

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi terkait hal-hal tersebut di atas antara lain:

- ✓ Retribusi pemakaian kekayaan daerah antara lain sewa gedung/ruangan/aula dan asrama milik Pemerintah Daerah belum maksimal.
- ✓ Lemahnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM meliputi manajemen, organisasi dan tatalaksana.
- ✓ Lemahnya Koperasi dan UMKM terhadap akses pasar.
- ✓ Lemahnya akses Koperasi dan UMKM terhadap sumber permodalan dan pembiayaan usaha.
- ✓ Lemahnya Koperasi dan UMKM terhadap penguasaan teknologi dan pemenuhan sarana dan prasarana usaha.
- ✓ Rendahnya kualitas SDM Koperasi dan UMKM yang meliputi kompetensi semangat dan jiwa kewirausahaan.

Beberapa langkah solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut diatas antara lain :

- ✓ Dimaksimalkan tingkat hunian gedung/ruangan/aula dan asrama, disamping meningkatkan PAD juga adanya efisiensi anggaran.
- ✓ Penguatan Kapasitas Kelembagaan KUMKM.
- ✓ Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui penguatan dan pengembangan Diversifikasi Usaha dan sistem distribusi/jaringan usaha serta peningkatan daya saing.
- ✓ Penguatan dan pengembangan permodalan dan jaringan kemitraan usaha KSP/USP-Kop.
- ✓ Pemberdayaan KUMKM melalui peningkatan produktivitas, pemasaran dan jaringan usaha.
- ✓ Pemberdayaan KUMKM melalui peningkatan produktivitas, pemasaran dan jaringan usaha.
- ✓ Perluasan dan peningkatan akses jangkauan pelayanan pendidikan.